



No. 017/GLP/DIR/IV/2020

Jakarta, 29 April 2020

Lampiran : Bukti Iklan Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Audit 2019

Attachment Advertising Proof of Announcement the 2019 Audited Consolidated Financial Statement

Kepada Yth./To:

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”)

Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Lantai 2

Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4

Up./Attention: Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa

Kepada Yth./To:

Direksi

PT Bursa Efek Indonesia

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53

Jakarta 12190

Up./Attention: Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 3

Perihal: Penyampaian Bukti Iklan Re. : Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Audit 2019 PT Graha Layar Prima Tbk.

Submission for Advertising Proof of Publication Announcement of the 2019 2019 Audited Consolidated Financial Statement of PT Graha Layar Prima Tbk.

Dengan Hormat,

Dear Sirs,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Bapepam-LK No. X.K.2. tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik; Peraturan Bursa Efek Indonesia (“BEI”) No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi; Surat OJK No: S-92/D.04/2020 tanggal 18 Maret 2020 tentang Relaksasi atas Kewajiban Penyampaian Laporan dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham; dan Surat Keputusan Direksi BEI No: Kep-00027/BEI/03-2020 tanggal 20 Maret 2020 tentang Relaksasi Batas Waktu Penyampaian Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan, bersama ini kami sampaikan Bukti Iklan atas Publikasi Laporan Keuangan Konsolidasian Audit 2019, yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang telah diterbitkan melalui Koran International Media pada tanggal 29 April 2020.

Laporan Keuangan ini juga telah kami unggah pada situs website Perseroan.

In compliance with Bapepam-LK Regulation No. X.K.2. concerning Submission of Periodic Financial Statements of Issuers or Public Companies; Indonesia Stock Exchange (“IDX”) Regulation No. I-E concerning Obligation for Information Submission; OJK Letter No: S-92/D.04/2020 dated 18 March 2020 regarding Relaxation of the Obligation to Submit Reports and Implementation of General Meeting of Shareholders; and Board of Directors Letter of IDX No: Kep-00027/BEI/03-2020 dated 20 March 2020 regarding Relaxation of the Deadline for Financial Statements and Annual Report Submission, with this letter we hereby submit Advertising Proof of Publication Announcement of the Audited Consolidated Financial Statement of PT Graha Layar Prima Tbk. (the “Company”) for the year ended on 31 December 2019, which has been published on International Media Newspaper dated 29 April 2020.

The said Financial Statement has also been published on the Company’s website.



Demikian hal ini kami sampaikan, atas *Thus we convey this information, thank you kindly for your attention.*
perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami/*Sincerely,*
PT GRAHA LAYAR PRIMA, Tbk.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Yeo, Deoksu".

Yeo, Deoksu
Direktur/ Director

Jakgung Muda Bidang Pembinaan Ditunjuk Jadi Plt Wakil Jaksa Agung

JAKARTA (IM) - Jakarta Agung Sanitair Burhanuddin menunjuk Jaksa Agung Muda bidang Pembinaan Bambang Sugeng Rukmono sebagai pelaksana tugas wakil jaksa agung. Hal itu tertuang dalam surat perintah dengan nomor Print-039/A/JA/04/2020 tertanggal 27 April 2020.

"Untuk menghindari kekosongan dan demi kelancaran tugas kedinasan Wakil Jaksa Agung RI maka diberikan surat perintah Jaksa Agung RI tersebut," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Hari Setiyono melalui keterangan tertulis, Selasa (28/4).

Seperti diketahui bahwa posisi wakil jaksa agung hanya sementara. ● mei

Urgen, MK Sidangkan Perppu Penanganan Covid-19 di Tengah Wabah Virus Korona

JAKARTA (IM) - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian peraturan pemerintah penganti undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020, Selasa (28/4/2020), Selasa (28/4).

Majelis hakim MK menilai bahwa pengujian Perppu ini bersifat mendesak, sehingga harus segera digelar meskipun di tengah situasi pandemi Covid-19. Adapun Perppu berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

"Kita harus patuh oleh protokol tentang social distancing dan ada PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," kata Aswanto. Hakim MK Daniel Yusmico P Foeck mengatakan, pihaknya sengaja memprioritaskan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau perppu Covid-19 lantaran masa berlaku perppu terbatas. "Mengingat masa berlaku perppu terbatas, maka wajar apabila permohonan terhadap pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 akan diprioritaskan," kata Daniel dikutip dari siaran pers di laman resmi MK, Senin (27/4).

Untuk diketahui, sidang hari ini menjadi sidang pertama yang digelar MK setelah hampir 1,5 bulan menunda persidangan akibat pandemi Covid-19. Terdapat tiga permohonan yang disidangkan pada hari ini, yang seluruhnya terkait dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Ketiga permohonan tersebut adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis. ● mei

sudah diregistrasi tapi sampai sekarang belum disidangkan, kami tidak bermaksud untuk melanggar hak konstitusional ibu bapak," ujar Aswanto. Aswanto menambahkan, untuk menghindari penyebaran Covid-19, pihaknya telah menerapkan protokol kesehatan dan keamanan selama persidangan.

Selain membantu jumlah peserta sidang dalam ruang persidangan, peserta juga diwajibkan menjaga jarak fisik selama sidang berlangsung.

"Kita harus patuh oleh protokol tentang social distancing dan ada PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," kata Aswanto.

Hakim MK Daniel Yusmico P Foeck mengatakan, pihaknya sengaja memprioritaskan pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 atau perppu Covid-19 lantaran masa berlaku perppu terbatas. "Mengingat masa berlaku perppu terbatas, maka wajar apabila permohonan terhadap pengujian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 akan diprioritaskan," kata Daniel dikutip dari siaran pers di laman resmi MK, Senin (27/4).

Untuk diketahui, sidang hari ini menjadi sidang pertama yang digelar MK setelah hampir 1,5 bulan menunda persidangan akibat pandemi Covid-19. Terdapat tiga permohonan yang disidangkan pada hari ini, yang seluruhnya terkait dengan Perppu Nomor 1 Tahun 2020. Ketiga permohonan tersebut adalah Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) dan kawan-kawan, Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan kawan-kawan, serta aktivis Damai Hari Lubis. ● mei

syah yang meninggal dunia akibat kecelakaan mobil. Kecelakaan terjadi di Jalan Tol Jagorawi, 4 April 2020. Setelah itu, Jaksa Agung mengisi posisi tersebut untuk sementara. Lalu apa yang akan dilakukan Bambang dengan tugas baru itu?

"Plt Wakil Jaksa Agung RI tersebut (Bambang) akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan rencana kerja dan program kerja yang telah dilaksanakan dan direncanakan oleh pejabat terdahulu disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini di masa pandemi Covid-19," tutur Han.

Surat perintah Jaksa Agung tersebut berlaku hingga ditetapkan wakil jaksa agung yang definitif. ● mei

2 | Polhukam

IDN/ANTARA



SIDANG DARING TIPIKOR BUPATI MUARA ENIM

Jurnalis mengabadikan sidang Tindak Pidana Korupsi dengan Terdakwa Bupati Muara Enim Ahmad Yani yang berlangsung secara daring di Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (28/4). Agenda sidang berisi pembelaan terdakwa Ahmad Yani.

'Pamerkan' Tersangka, Konferensi Pers yang Dilakukan KPK Kok Mirip di Polri

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan, penyelenggaraan konferensi pers dengan 'memamerkan' para tersangka untuk memberikan rasa keadilan untuk masyarakat.

JAKARTA (IM) - Ada yang berbeda dalam penyelenggaraan konferensi pers di KPK. Lembaq antikorupsi itu 'memamerkan' tersangka di latar belakang dengan menampilkan punggung para tersangka.

Kurnia mengatakan, konferensi pers dengan cara mempertontonkan tersangka bukanlah kebiasaan di KPK, melainkan kebiasaan di institusi penegak hukum lainnya. Ke-hadiran para tersangka dalam konferensi pers merupakan hal yang tak lazim karena konferensi pers biasanya hanya dihadiri oleh perwakilan KPK yang memberi keterangan kepada awak media.

"Selama 4 periode tidak pernah terjadi (menampilkan tersangka saat konferensi pers)," ujar Syarif kepada wartawan, Selasa (28/4).

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri belum memahami kebiasaan yang ada dalam lembaga antirasuah tersebut. "Hal itu dapat dimaklumi, karena toh juga sampai saat ini Firli tidak pernah menyatakan mundur dari institusinya terdahulu (Polri). Jadi, wajar saja kebiasaan-kebiasaan

lama yang bersangkutan masih dibawa-bawa ke KPK," kata Kurnia dalam keterangan terpisah, Selasa (28/4).

Kurnia mengatakan, konferensi pers dengan cara mempertontonkan tersangka bukanlah kebiasaan di KPK,

melainkan kebiasaan di institusi penegak hukum lainnya. Ke-hadiran para tersangka dalam konferensi pers merupakan hal yang tak lazim karena konferensi pers biasanya hanya dihadiri oleh perwakilan KPK yang memberi keterangan kepada awak media.

Konferensi pers yang dimaksud terjadi pada Senin (27/4) kemarin. Konferensi pers berlangsung virtual menampilkan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata bersama Deputi Penindakan KPK Karyoto dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri.

Sedangkan di belakang mereka terdapat 2 orang mengejutkan rompi tahanan KPK.

Dua orang itu tampak menunduk dengan posisi membela-kangi kamera sehingga hanya punggung mereka saja yang tampak. Keduanya adalah Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kepala Dinas PUPR Ramlan Suryadi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dalam konferensi pers tersebut, Aries dan Ramlan tampak berdiri di belakang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri yang memberi keterangan. Aries dan Ramlan yang telah mengenakan rompi tahanan warna oranye khas KPK itu berdiri memunggungi kamera sehingga wajahnya tak terlihat.

Kurnia menilai pamerkan tersangka saat konferensi pers agar terkesan KPK yang kini dikomandoi Fili dan kawakan-

kan tampil beda. Kurnia mencontohkan, pimpinan KPK periode sebelumnya

sering melakukan penindakan dan kerap berhasil membongkar skandal korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara yang besar.

"Sedangkan rezim ke-

mpimpin Firli sangat minim

mengenakan rompi tahanan KPK.

Menurutnya, dengan adanya kepastian hukum, hal itu bisa memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

"Tujuan penegakan hukum

adalah memberikan kepastian hukum dan KPK harus hadir memberikan kepastian hukum. Kita harus memberikan keadilan dan juga kemanfaatan bagi masyarakat," ujarnya.

Menurut Kurnia, publik akan bangga ke KPK jika Firli Bahuri dapat menangkap Harun Masiku, Nurhadi, dan yang lainnya, dan melanjutkan kasus batalour Bank Century, dan menuntaskan kasus pengadaan KTP Eletronik. "Namun, melihat pola kerja Pimpinan KPK saat ini rasanya keinginan publik itu tidak akan pernah terrealisasi," ujar Kurnia.

Untuk Rasa Keadilan

Sementara Ketua KPK, Firli Bahuri menjelaskan maksud dan tujuan penyelenggaraan konferensi pers dengan 'memamerkan' para tersangka adalah untuk memberikan rasa keadilan untuk masyarakat.

"Dengan menghadirkan para tersangka saat konferensi pers agar terkesan KPK yang kini dikomandoi Fili dan kawakan-

kan tampil beda," dan melihat perlakuan yang sama kepada semua tersangka. (Prinsip equality before the law) sudah dihadirkan," kata Firli kepada wartawan, Selasa (28/4).

Firli menekankan kepastian hukum adalah hal utama yang harus diberikan.

Menurutnya, dengan adanya kepastian hukum, hal itu bisa memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

"Tujuan penegakan hukum

adalah memberikan kepastian hukum dan KPK harus hadir memberikan kepastian hukum. Kita harus memberikan keadilan dan juga kemanfaatan bagi masyarakat," ujarnya.

Selain itu, Firli mengatakan, dengan adanya kepastian hukum, akan timbul kepercayaan bahwa penegakan hukum mampu mengubur perilaku masyarakat dari buruk menjadi baik. Dengan demikian, Firli berharap, dengan memamerkan tersangka di konferensi pers, hal itu bisa memberikan efek jera agar masyarakat tak melakukan korupsi.

"Juga memberikan efek jera kepada masyarakat supaya tidak melakukan korupsi. Masyarakat harus tenang, tidak boleh dibuat was-was, apalagi gaduh," tutur Firli.

KPK menduga Aries dan Ramlan turut menerima uang dari pengusaha Robi Okta Fahlefi, yang saat ini sudah divonis 3 tahun penjara dalam kasus ini. Aries diduga menerima uang sebesar Rp 3,031 miliar, sedangkan Ramlan diduga juga menerima uang dari Robi sebesar Rp 1,115 miliar dan telepon seluler merek Samsung Note 10.

Pemberian uang terhadap kedua tersangka itu bagian dari commitment fee proyek di Dinas PUPR yang diperoleh Robi. Total ada 16 paket pekerjaan di Kabupaten Muara Enim dengan dengan nilai Rp 130 miliar. ● han

LAPORAN KEUANGAN

PT GRAHA LAYAR PRIMA Tbk. DAN ENTITAS ANAK

www.cgv.id

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	2019	2018	LIABILITAS DAN EKUITAS	2019	2018
Aset lancar			LIABILITAS		
Kas dan setara kas	84.678.006	41.647.572	Liabilitas jangka pendek		
Piutang usaha	154.138.082	148.741.113	Pinjaman bank jangka pendek	154.010.050	40.000.000
Persediaan	23.106.214	10.662.998	Utang usaha	82.273.058	84.186.570
Biaya dibayar dimuka	21.646.639	37.937.734	Akrual dan utang lain-lain	173.519.132	197.160.242
Aset lancar lainnya	7.042.803	3.957.987	Utang pajak:		
			- Pakaj penghasilan badan	6.207.074	15.645.391
			- Pakaj lainnya	22.974.551	21.825.856
			Liabilitas derivatif	15.444.480	-
			Bagian jangka pendek dari pinjaman jangka panjang:		
			- Pinjaman bank	204.085.000	-
			- Pinjaman lain	-	9.859.514
Jumlah aset lancar	290.611.744	242.947.404	Jumlah liabilitas jangka pendek	658.513.345	368.677.573
Aset tidak lancar			Liabilitas jangka panjang		
Uang muka pembelian aset tidak lancar	32.308.949	27.992.009	Pinjaman jangka panjang:		
Aset tetap	1.432.675.499	1.341.510.315	- Pinjaman bank	221.510.000	-
Biaya dibayar dimuka	119.436.350	86.941.778	Kewajiban imbalan kerja	14.977.209	11.382.280
Aset derivatif	-	14.656.513			
Aset pajak tangguhan	3.698.128	10.011.522			
Aset tidak lancar lainnya	38.587.298	37.948.147			
Jumlah aset tidak lancar	1.626.706.224	1.519.060.284	Jumlah liabilitas jangka panjang	14.977.209	232.892.280
Jumlah aset	1.917.317.968	1.762.007.688	Jumlah liabilitas	673.490.554	601.569.853
			EKUITAS		
			Modal saham	601.883.608	601.883.608
			Tambahan modal disetor	1.118.342.981	1.118.342.981
			Akumulasi kerugian	(476.411.298)	(559.796.337)
			Ekuatas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.243.815.291	1.160.430.252
			Kepentingan nonpengendali	1	